



Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila
Kelas	: XI / 5 Madrasah
Jenjang Pendidikan	: SMA IT Manba'ul Huda Sidaraja
Hari/Tanggal	:
Waktu	: 60 Menit

I. Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini dengan tepat.

1. Peluang utama bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi saat ini adalah...
 - a. Menutup diri dari perkembangan teknologi asing
 - b. Menyebarluaskan narasi kebudayaan gotong royong dan toleransi lewat media digital dunia
 - c. Membatasi hubungan diplomatik dengan negara barat
 - d. Menolak segala bentuk investasi ekonomi luar
2. Tantangan eksternal terbesar yang dihadapi oleh ideologi Pancasila dalam era keterbukaan informasi adalah...
 - a. Kurangnya jumlah sarana komunikasi di perdesaan
 - b. Masuknya paham radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme yang merusak moral
 - c. Menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk usia muda
 - d. Adanya kesepakatan dagang internasional bebas
3. Gaya hidup individualistis yang mulai mewabah di perkotaan merupakan salah satu ancaman serius bagi kelestarian Pancasila, khususnya sila...
 - a. Pertama
 - b. Kedua
 - c. Ketiga
 - d. Keempat
4. According to Act No. 12/2011, kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dipegang oleh...
 - a. Ketetapan MPR
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Peraturan Presiden
 - d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Asas dalam hierarki hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dinamakan...
 - a. Lex superior derogat legi inferior
 - b. Lex posterior derogat legi priori

- c. Lex specialis derogat legi generali
 - d. Asas legalitas umum
6. Pancasila berkedudukan sebagai 'Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara'. Hal ini mengandung makna filosofis bahwa...
- a. Semua undang-undang boleh bertentangan dengan Pancasila asalkan situasi darurat
 - b. Pancasila merupakan materi dasar yang menjiwai seluruh isi peraturan perundang-undangan
 - c. Pancasila dapat diubah kapan saja melalui Keputusan Presiden
 - d. Pancasila berada di bawah kedudukan Ketetapan MPR
7. Produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden disebut...
- a. Peraturan Pemerintah
 - b. Peraturan Presiden
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Daerah Provinsi
8. Apabila sebuah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten terbukti bertentangan dengan Undang-Undang, maka konsekuensi hukumnya adalah...
- a. Perda tetap berlaku secara eksklusif di daerah tersebut
 - b. Undang-Undang di atasnya wajib direvisi sesuai usulan daerah
 - c. Perda tersebut batal demi hukum atau harus segera dibatalkan
 - d. Masyarakat dibebaskan untuk tidak mematuhi kedua aturan
9. Lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah...
- a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
10. Lembaga negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah...
- a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Dewan Perwakilan Daerah
 - d. Presiden
11. Partisipasi aktif seorang warga negara yang mencerminkan kesadaran hukum paling mendasar di lingkungan sekolah adalah...
- a. Membuat peraturan kelas sendiri tanpa melibatkan wali kelas
 - b. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh disiplin

- c. Mengkritik seluruh kebijakan kepala sekolah di media sosial
 - d. Membolos sekolah jika aturan dianggap terlalu mengekang
12. Fungsi Pancasila sebagai filter dalam dinamika kehidupan global bertujuan untuk...
- a. Menghentikan total kerja sama dengan negara lain
 - b. Menyaring budaya luar agar yang diadopsi hanya yang selaras dengan kepribadian bangsa
 - c. Mengubah dasar negara sesuai perkembangan zaman modern
 - d. Menolak masuknya ilmu pengetahuan dari luar negeri
13. Tindakan menyebarkan berita bohong (hoaks) yang memicu perpecahan antar-suku dan agama di dunia maya bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila...
- a. Pertama dan Kedua
 - b. Ketiga dan Keempat
 - c. Kedua dan Ketiga
 - d. Pertama dan Ketiga
14. Keterlibatan aktif Indonesia dalam mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian PBB mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke...
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
15. Ketetapan MPR berada pada urutan hierarki hukum setelah...
- a. Undang-Undang
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Peraturan Presiden
 - d. UUD NRI Tahun 1945
16. Berikut ini yang merupakan contoh dari nilai instrumental dari sila keempat Pancasila adalah...
- a. Kegiatan gotong royong warga desa
 - b. Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengatur tentang mekanisme Pemilu
 - c. Sikap toleransi saat upacara keagamaan
 - d. Pembagian bansos secara merata
17. Sikap toleransi antar umat beragama demi menjaga integrasi bangsa merupakan contoh konkrit dari nilai...
- a. Dasar Pancasila
 - b. Instrumental Pancasila
 - c. Praktis Pancasila
 - d. Hukum Internasional

18. Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan...
- Undang-Undang sebagaimana mestinya
 - Peraturan Daerah
 - Peraturan Gubernur
 - Aspirasi partai politik
19. Semangat nasionalisme yang berlebihan dan memandang rendah bangsa lain disebut chauvinisme. Paham ini dilarang karena bertentangan dengan Pancasila sila...
- Pertama
 - Kedua
 - Keempat
 - Kelima
20. Pelaksanaan musyawarah mufakat di lingkungan masyarakat merupakan salah satu wujud penerapan nilai Pancasila, yaitu nilai...
- Dasar
 - Instrumental
 - Praktis
 - Ideal
21. Tantangan internal penerapan Pancasila di era modern salah satunya adalah ego sektoral. Maksud dari ego sektoral adalah...
- Sikap mengutamakan kepentingan daerah atau kelompoknya sendiri di atas kepentingan nasional
 - Sikap cinta tanah air yang tinggi
 - Kemauan untuk berkolaborasi lintas budaya
 - Kepatuhan mutlak pada aturan hukum
22. Di bawah ini yang merupakan tata urutan perundang-undangan yang benar dari tingkat tertinggi hingga terendah menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah...
- UUD 1945 - UU/Perpu - Tap MPR - PP - Perpres - Perda
 - UUD 1945 - Tap MPR - UU/Perpu - PP - Perpres - Perda
 - UUD 1945 - PP - Perpres - UU/Perpu - Tap MPR - Perda
 - UUD 1945 - Tap MPR - PP - Perpres - UU/Perpu - Perda
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal...
- Keadaan normal dan terencana
 - Ihwal kegentingan yang memaksa
 - Permintaan tertulis dari Mahkamah Agung
 - Adanya kunjungan kenegaraan asing

24. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal...
- 27 ayat (3)
 - 29 ayat (2)
 - 30 ayat (1)
 - 31 ayat (1)
25. Penerapan sistem ekonomi berbasis asas kekeluargaan dan gotong royong diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal...
- 31
 - 32
 - 33
 - 34
26. Sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam dunia kerja sangat mencederai esensi nilai Pancasila pilar...
- Keadilan sosial dan Kemanusiaan
 - Persatuan dan Kerakyatan
 - Ketuhanan dan Persatuan
 - Kerakyatan dan Keadilan
27. Berikut yang termasuk peluang penerapan Pancasila bagi pelajar di dunia digital adalah...
- Mengikuti tren tari luar negeri secara berlebihan
 - Membuat komunitas belajar daring berbasis toleransi dan diskusi sehat
 - Melakukan cyberbullying kepada teman sekolah
 - Membaca berita tanpa melakukan konfirmasi validitas
28. Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) memiliki fungsi konstitutif, artinya...
- Mengarahkan hukum agar dapat diubah sesuai selera penguasa
 - Menentukan bahwa hukum yang dibuat harus bersumber dan berlandaskan pada nilai Pancasila
 - Menggantikan peran undang-undang pidana formal
 - Membatasi kewenangan badan peradilan umum
29. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama...
- Gubernur
 - Walikota
 - Bupati
 - Presiden
30. Fungsi regulatif Pancasila terhadap hukum tertulis negara adalah...
- Menghapus hukum yang sudah tua

- b. Menguji apakah suatu peraturan hukum adil dan tidak bertentangan dengan nilai luhur dasar
 - c. Mewajibkan pembentukan hukum baru setiap tahun
 - d. Mengatur sistem administrasi peradilan nasional
31. Kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat ditandai dengan...
- a. Kepatuhan hukum karena takut sanksi polisi
 - b. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas
 - c. Kepatuhan terhadap aturan atas dasar kesadaran hak dan kewajiban secara sukarela
 - d. Maraknya aksi main hakim sendiri
32. Sikap bangga menggunakan batik dan mempromosikannya di media sosial global adalah bentuk pengamalan sila...
- a. Kedua
 - b. Ketiga
 - c. Keempat
 - d. Kelima
33. Dampak negatif globalisasi yang berupa kecenderungan mengkonsumsi barang luar negeri secara berlebihan dinamakan...
- a. Individualisme
 - b. Konsumerisme
 - c. Sekularisme
 - d. Hedonisme
34. Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena UUD NRI 1945 merupakan...
- a. Hukum tidak tertulis
 - b. Hukum dasar tertulis negara
 - c. Hukum internasional yang adat
 - d. Keputusan mutlak presiden pertama
35. Asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama untuk materi yang sama disebut...
- a. Lex posterior derogat legi priori
 - b. Lex superior derogat legi inferior
 - c. Lex specialis derogat legi generali
 - d. Asas kepastian hukum
36. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang jujur dan adil merupakan pengamalan instrumental dari sila...
- a. Pertama
 - b. Kedua

- c. Ketiga
 - d. Keempat
37. Pihak yang wajib menghormati hukum dan pemerintahan di Indonesia adalah...
- a. Hanya Pegawai Negeri Sipil
 - b. Hanya aparat penegak hukum
 - c. Setiap warga negara tanpa kecuali
 - d. Hanya warga negara asing
38. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke...
- a. Satu
 - b. Dua
 - c. Tiga
 - d. Empat
39. Sikap hidup hemat, rajin menabung, dan menghargai hasil karya orang lain merupakan nilai praktis dari sila...
- a. Kedua
 - b. Ketiga
 - c. Keempat
 - d. Kelima
40. Tujuan utama dari dibentuknya tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah...
- a. Menciptakan kepastian hukum, ketertiban, and keselarasan antarperaturan
 - b. Memperbanyak jumlah denda bagi pelanggar hukum
 - c. Mempermudah pemerintah mengubah konstitusi negara
 - d. Membatasi hak berpendapat warga negara

II. Pilihlah jawaban benar ! Jawaban lebih dari satu.

41. Sebuah organisasi kemasyarakatan digital menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan konten literasi digital, mengkampanyekan anti-hoaks, serta menggalang dana kemanusiaan bagi korban bencana alam secara transparan lintas wilayah.

Tindakan organisasi kemasyarakatan digital tersebut merupakan bentuk peluang sekaligus aktualisasi nyata dari nilai Pancasila, yaitu...

	Sila kedua, karena menunjukkan aksi kemanusiaan global dan kepedulian antar-sesama tanpa sekat wilayah.
	Sila ketiga, karena menggunakan instrumen digital untuk mempererat persatuan dan solidaritas nasional.
	Tindakan tersebut salah karena penggalangan dana digital dilarang oleh aturan adat setempat.

	Sila kelima, karena mencerminkan keadilan sosial dan kebaikan gotong royong modern demi kemaslahatan bersama.
	Menutup peluang interaksi dengan dunia internasional agar fokus pada masalah lokal saja.

42. *Dalam perumusan Peraturan Desa (Perda), sekelompok warga merasa aspirasinya diabaikan karena jumlah mereka sedikit. Kepala desa kemudian berinisiatif menunda pengesahan dan mengundang seluruh perwakilan kelompok warga, termasuk kelompok minoritas, untuk berdialog dalam forum dengar pendapat digital dan fisik.*

Tindakan yang diambil kepala desa tersebut selaras dengan pilar dasar hukum dan nilai Pancasila, yaitu...

	Prinsip musyawarah mufakat yang berkeadilan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
	Otoritas mutlak kepala desa untuk memaksakan aturan tanpa mendengar masukan warga.
	Penghormatan terhadap hak asasi warga negara dalam mengemukakan pendapat secara demokratis.
	Asas kepastian hukum di mana suara mayoritas mutlak harus selalu menindas kelompok minoritas.
	Sila kelima, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi.

43. *Era keterbukaan informasi memicu membanjirnya budaya asing masuk ke kalangan pelajar melalui aplikasi luar negeri. Banyak pelajar yang mulai mengadopsi budaya konsumerisme, hedonisme, serta melupakan kesantunan budaya ketimuran.*

Langkah strategis yang dapat ditempuh pihak sekolah dan organisasi siswa untuk menyikapi tantangan global ini adalah

	Melarang penggunaan teknologi internet secara total di sekolah dan rumah.
	Mengoptimalkan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila bertema kearifan lokal secara kreatif.
	Membuat konten edukasi digital yang mempromosikan tradisi dan nilai luhur Pancasila secara modern.
	Menerima seluruh tren barat tanpa seleksi agar sekolah dianggap maju dan kompetitif.
	Mengembangkan sikap kritis siswa dalam memfilter informasi dan budaya luar (Sila ke-3).

44. Sebuah rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dinilai oleh sebagian kelompok masyarakat memuat pasal yang membatasi hak kebebasan beribadah kelompok keagamaan tertentu secara diskriminatif.

Based on the keselarasan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, pernyataan hukum yang benar adalah.....

	Perda tersebut tidak boleh disahkan karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945 Pasal 29.
	Perda tersebut tetap sah selama disetujui oleh mayoritas anggota DPRD tanpa memandang aturan di atasnya.
	Rancangan Perda tersebut melanggar nilai dasar Pancasila, khususnya Sila pertama.
	Masyarakat yang keberatan dapat mengajukan permohonan pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung jika Perda telah disahkan.
	Perda tersebut mengesampingkan UUD NRI 1945 berdasarkan asas kedaulatan daerah otonom.

45. Pemerintah menetapkan regulasi yang mewajibkan seluruh perusahaan besar untuk menerapkan program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) serta menyerap tenaga kerja lokal di sekitar wilayah operasional pabrik..

Kebijakan regulasi pemerintah tersebut mencerminkan keselarasan nilai hukum Pancasila pilar...

	Sila kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
	Sila kedua, dengan menghormati hak kemanusiaan warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
	Sila ketiga, karena memperkuat ketahanan sosial dan persatuan daerah dengan meminimalkan kesenjangan.
	Tindakan kapitalis yang merugikan iklim investasi nasional secara menyeluruh.
	Sila pertama, karena mewajibkan seluruh karyawan perusahaan mengikuti ritual keagamaan setempat.

NO	Kasus & Pernyataan	Salah	Benar
46	Kasus: Seorang pelajar aktif membagikan konten edukasi toleransi beragama dan potongan video kebudayaan daerah Indonesia di platform internasional.		
	Pernyataan: Tindakan tersebut merupakan contoh konkrit pemanfaatan peluang era digital dalam mengamalkan Pancasila ke kancah global.		
47	Kasus: Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang isinya secara eksplisit bertentangan dengan norma Ketetapan MPR yang masih berlaku aktif.		
	Pernyataan: Berdasarkan asas hierarki hukum Lex superior derogat legi inferior, Peraturan Presiden tersebut tetap sah dan membatalkan Ketetapan MPR.		
48	Kasus: Warga sekolah sepakat mengadakan sistem pemungutan suara digital (e-voting) untuk pemilihan ketua OSIS yang jujur, adil, transparan, dan inklusif.		
	Pernyataan: Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum internal ini selaras dengan nilai demokratis pilar Sila keempat Pancasila.		
49	Kasus: Sebuah Undang-Undang baru disahkan oleh DPR dan Presiden, namun materi muatannya dinilai menindas hak kesejahteraan ekonomi buruh lokal.		
	Pernyataan: Peraturan hukum tersebut tidak dapat digugat atau diuji materiil oleh masyarakat karena produk hukum pusat sifatnya absolut mutlak.		
50	Kasus: Masyarakat adat di pedalaman mengelola hutan secara mandiri berdasarkan asas kekeluargaan dan melestarikan lingkungan demi generasi masa depan.		
	Pernyataan: Pengelolaan lingkungan berbasis kebersamaan dan perlindungan sosial berkelanjutan ini mencerminkan pengamalan nyata Sila kelima Pancasila.		